



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 12 September 2017.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L TA 2018; 2. Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK; dan 3. Lain-lain
Hadir	: 37 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Triawan Munaf/Kepala Badan Ekonomi Kreatif beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 17.30 WIB oleh Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Badan Ekonomi Kreatif RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

A. RKA K/L TA 2018

1. Bekraf RI menyampaikan paparan dan penjelasan sbb:

- 1) Bekraf RI menyampaikan usulan pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2018 sebesar Rp 746.158.140.000,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:

i. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Rp 149.271.380.000,-
ii. Program pengembangan ekraf	<u>Rp 596.886.760.000,-</u>
Total	Rp 746.158.140.000,-

- 2) Bekraf RI melalui surat Nomor 1956/516/set.Bekraf/VII/2017 mengajukan usulan penambahan pagu RAPBN TA 2018 sebesar Rp200 miliar untuk:
 - i. Penyusunan RUU tentang Ekonomi Kreatif.
 - ii. Dekonsentrasi pengembangan ekraf di daerah.
 - iii. Pendukung *event-event* yang berskala nasional maupun internasional.
 - iv. Revitalisasi ruang kreatif.
 - v. Tambahan atas output prioritas nasional dan bidang.
- 3) Bekraf RI menyampaikan faktor-faktor yang menyebabkan BPK tidak memberikan pendapat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan TA 2016, dan Bekraf RI juga telah melaporkan rencana aksi dalam rangka mewujudkan laporan K/L berkualitas yang terbebas dari opini *disclaimer*.
- 4) Bekraf RI menyampaikan realisasi anggaran tahun 2017 per 6 September 2017 mencapai 33%, dan memproyeksikan realisasi daya serap sampai akhir Desember 2017 akan mencapai 95%.

2. Pandangan dan Sikap Komisi X DPR RI

- 1) Berdasarkan:
 - i. LKPP tahun 2016 hanya mencapai 34%.
 - ii. Daya serap APBN Perubahan TA 2017 baru mencapai 33% per 6 September 2017.
 - iii. Proyeksi daya serap mulai 7 September sampai akhir Desember 2017 meningkat secara signifikan (95%) yang sesungguhnya tidak baik dalam pelaksanaan APBN dan kurang signifikan untuk mendukung pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif maupun pertumbuhan ekonomi secara nasional.
 - iv. Program yang disusun belum dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat.
 - v. Pasal 98 ayat (2) huruf c UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Maka, terhadap usulan pagu anggaran dan program sebagaimana dimaksud pada poin II.A.1.1, Komisi X DPR RI **belum menyepakati pagu anggaran Badan Ekonomi Kreatif RI** pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp746.158.140.000,- (tujuh ratus empat puluh enam miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk itu, Komisi X DPR RI mendesak Bekraf RI untuk menyampaikan rencana penyerapan anggaran APBN Perubahan TA 2017 yang lebih detail, lebih realistis, rasional dalam kurun waktu September sampai dengan Desember 2017 yang diproyeksikan mencapai 95%.

- 2) Terhadap usulan penambahan pagu RAPBN TA 2018 sebesar Rp200 miliar sebagaimana dimaksud pada poin II.A.1.2, Komisi X DPR RI tidak mendukung usulan permohonan tambahan tersebut, dan meminta Bekraf RI untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dan membuat usulan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada poin II.2.1.
- 3) Terhadap rencana aksi Bekraf RI dalam rangka mewujudkan laporan K/L berkualitas yang terbebas dari opini *disclaimer* sebagaimana dimaksud pada poin II.A.1.3, Komisi X DPR RI memberikan apresiasi dan mendukung terwujudnya laporan keuangan yang terbebas dari opini *disclaimer*.
- 4) Terhadap daya serap Bekraf RI yang baru mencapai 33% per 6 September 2017 dan proyeksi realisasi daya serap APBN Perubahan TA 2017 yang akan mencapai 95% sebagaimana dimaksud pada poin II.A.1.4, Komisi X DPR RI mengingatkan Bekraf RI agar lebih realistis dalam memproyeksikan realisasi daya serap, meminimalkan risiko, dan dampak permasalahan yang mungkin terjadi.

B. Program yang akan didanai oleh DAK

Bekraf RI tidak menyampaikan usulan program yang akan didanai oleh DAK pada RAPBN TA 2018.

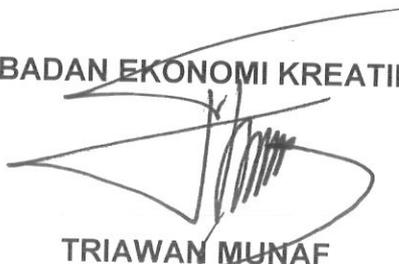
C. Lain-lain.

Komisi X DPR RI dan Kepala Bekraf RI sepakat akan mengadakan RDP kembali yang direncanakan antara tanggal 3 s.d. 11 Oktober 2017 dengan agenda antara lain (i) pendalaman jawaban tertulis, (ii) mengusulkan kembali program/kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan poin II.A.2.1 dan penyesuaian RKA-K/L TA 2018 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.00 WIB

BADAN EKONOMI KREATIF RI,



TRIAWAN MUNAF

KETUA RAPAT,



IR. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA M.M.